

BAB IV

FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PELAKSANAAN PEMBIMBINGAN OLEH PEMBIMBING KEMASYARAKATAN PADA KLIEN PEMASYARAKATAN ANAK

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 14 Februari 2014 dengan KaBapas dan Pembimbing Kemasyarakatan menemukan beberapa hambatan dalam pelaksanaan pembimbingan pada klien anak di Bapas Klas II A Bengkulu sebagai berikut :

A. Menurut Petugas Balai Pemasyarakatan

1. Faktor biaya

Faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembimbingan yang dilakukan Balai Pemasyarakatan klas II A Bengkulu adalah faktor biaya. Menurut Ibu **Misdarti** setiap tahun Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM mengajukan beberapa kegiatan pembimbingan untuk Bapas di Kementerian Hukum dan HAM, akan tetapi yang lolos hanya satu kegiatan saja. Pemberian dana ini tidak setiap tahun atau tidak kontinue. Pada tahun 2012 dan tahun 2013 diberi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00, yang digunakan untuk mengadakan latihan keterampilan menyetir mobil. Biaya satu orang klien sebesar Rp 2.000.000,00, dengan rincian terdiri dari biaya latihan menyetir mobil, biaya pembuatan SIM A, biaya transportasi klien, dan biaya makan. Pelaksanaan latihan menyetir mobil diadakan selama dua

minggu. Pada tahun 2012 jumlah peserta sebanyak 20 orang terdiri dari 8 orang klien anak dan 12 orang klien dewasa. Pada tahun 2013 jumlah peserta sebanyak 22 orang terdiri dari 10 orang klien anak dan 12 orang klien dewasa. Pada tahun 2014 Bapas tidak mendapatkan anggaran untuk mengadakan kegiatan keterampilan kerja dan kegiatan *home visit*. Hal ini tentu menghambat pelaksanaan pembimbingan yang dilakukan oleh Bapas.

2. Faktor sarana dan prasarana

a. Kurangnya sarana transportasi untuk pelaksanaan pembimbingan

Menurut Bapak **Hendra Wijaya** kendaraan dinas yang dimiliki oleh Balai Pemasyarakatan Klas II A Bengkulu untuk kendaraan operasional berjumlah tiga unit, yaitu dua unit motor dan satu unit mobil dengan kondisi dua unit motor sudah tidak layak pakai. Akibatnya ada beberapa jadwal kunjungan tidak dapat dilaksanakan dengan tepat waktu karena, harus menunggu kendaraan dinas secara bergantian dan kadang-kadang Pembimbing menggunakan kendaraan pribadi.

b. Kurangnya anggaran perjalanan dinas

Kekurangan dana operasional juga menjadi hambatan bagi Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan bimbingan langsung ditempat tinggal (*home visit*) Klien Anak. Dalam melakukan kegiatan *Home Visit*, PK diberikan biaya sebesar Rp 40.000,00. , biaya tersebut

digunakan untuk satu orang klien anak selama menjalani pembimbingan. Dengan dana yang minim ini Pembimbing Kemasyarakatan kesulitan untuk melakukan bimbingan langsung ditempat tinggal klien, terutama untuk klien anak yang tinggal di luar Kota Bengkulu, karena anggarannya tidak mencukupi.

3. Kurangnya kemampuan melakukan konseling pada Pembimbing Kemasyarakatan

Jumlah Pembimbing Kemasyaratan pada bagian Bimbingan Klien Anak (BKA) sebanyak sepuluh orang, dari sepuluh orang Pembimbing Kemasyarakatan hanya dua orang menguasai ilmu konseling. Delapan orang Pembimbing kemasyarakatan anak lainnya belum mendapatkan pelatihan mengenai konseling, sehingga *konseling dan sharing* yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan menjadi tidak efektif dan terkesan sebisanya saja.

4. Banyak klien anak yang jarang melakukan wajib lapor

Hambatan yang dihadapi oleh pihak Bapas adalah klien anak jarang melapor. Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan 3 orang klien anak, mereka menjalani wajib lapor tidak setiap bulan dan berhenti melakukan wajib lapor sebelum masa bimbingan berakhir. Hal ini tentu, menyebabkan pembimbingan yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan

menjadi tidak maksimal. Penyebabnya klien anak sudah bekerja dan ada klien anak yang malas melakukan wajib lapor.

5. Klien Anak kurang berminat mengikuti program bimbingan yang diselenggarakan oleh Bapas

Hambatan dalam pelaksanaan pembimbingan pada klien anak menurut **Hendra Wijaya** adalah, klien anak kurang berminat dalam mengikuti bimbingan keterampilan kerja yaitu latihan menyetir mobil yang diadakan Bapas. Pada tahun 2013 sebanyak 10 orang klien anak yang diundang untuk mengikuti program bimbingan keterampilan kerja, akan tetapi yang hadir mengikuti bimbingan keterampilan kerja hanya 5 orang klien anak.

6. Kerjasama antara Balai Pemasarakatan dengan pihak Dinas Sosial Provinsi dan Balai Latihan Kerja Provinsi tidak dilaksanakan secara rutin

Kerjasama Bapas dengan pihak Dinas Sosial Provinsi dan Balai Latihan Kerja tidak dilaksanakan secara rutin, karena menurut KaBapas untuk mengadakan kerjasama latihan keterampilan kerja, Bapas harus menunggu konfirmasi dari pihak Dinas Sosial Provinsi dan Balai Latihan Kerja apabila akan mengadakan keterampilan kerja.

B. Menurut Klien Pemasyarakatan Anak dan Orang Tua Klien

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 16-17 Februari 2014 dengan klien anak dan orang tua klien hambatan dalam pembimbingan yaitu :

1. Program bimbingan yang diberikan oleh Bapas belum maksimal

Bimbingan yang diberikan Bapas kepada klien anak masih belum maksimal, karena bimbingan kepribadian yaitu bimbingan *konseling dan sharing* yang diberikan pada klien anak hanya sekedar menanyakan keadaan dan kegiatan yang dilakukan oleh klien anak. Bimbingan keterampilan yang diadakan oleh Bapas berupa latihan menyetir mobil, seharusnya diberikan pada klien anak yang belum bisa menyetir mobil, tetapi juga diberikan pada klien anak yang sudah bisa menyetir mobil. Pelaksanaan latihan menyetir mobil tidak sesuai dengan yang tertera di dalam undangan yaitu dua minggu tetapi hanya dilaksanakan empat hari. Selain itu, program perencanaan pemberian modal sebesar Rp 5.000.000,00, bagi klien anak yang tidak mampu belum terealisasi. Dengan demikian bimbingan yang diberikan belum dirasakan manfaatnya oleh klien anak dan orang tua klien.

2. Klien Anak Tidak Melakukan Wajib Lapor Secara Rutin

Klien anak yang telah memiliki pekerjaan kesulitan untuk menjalani wajib lapor secara rutin ke Bapas, karena menurut klien anak untuk mendapatkan izin keluar dari atasannya sangat sulit.

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai faktor penghambat dalam pelaksanaan pembimbingan pada klien anak analisis penulis bahwa biaya untuk mengadakan bimbingan latihan kerja tidak sepenuhnya digunakan. Hal ini terbukti bahwa biaya yang digunakan untuk mengadakan latihan menyetir mobil selama dua minggu tetapi hanya terlaksana empat hari. Kurangnya kemampuan melakukan konseling pada pada Pembimbing Kemasyarakatan menyebabkan bimbingan konseling menjadi tidak efektif dan tidak semua klien anak mendapatkan bimbingan konseling. Untuk sarana dan prasana yang dkhhususkan untuk klien anak dalam pelaksanaan pembimbingan tidak ada. klien anak yang jarang melapor ke Bapas menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan pembimbingan. Hal ini berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa tiga orang klien anak tidak menjalani wajib lapor dan berhenti melakukan wajib lapor sebelum masa bimbingan berakhir. Kerjasama Bapas dengan pihak Dinas Sosial Provinsi dan Balai Latihan Kerja dalam memberikan bimbingan keterampilan kerja tidak secara rutin, sehingga bimbingan keterampilan kerja yang diberikan ada yang tidak berdasarkan pada kebutuhan klien anak dan tidak merata.

BAB V

BENTUK BIMBINGAN YANG IDEAL BAGI KLIEN

PEMASYARAKATAN ANAK

1. Menurut Petugas Balai Pemasyarakatan

Menurut petugas Bapas konsep pembimbingan yang ideal adalah pada tahap awal diadakan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dengan anggota terdiri dari ketua : Kasubsi BKD, wakil ketua : Kasubsi BKA, sekretaris : PK Dewasa, dan anggota : PK Anak. pada sidang TPP ini membahas program bimbingan kepribadian yang akan diberikan pada klien anak yang dilihat dari litmas klien anak yaitu latar belakang dan faktor penyebab klien anak melakukan tindak pidana. Setelah diketahui kebutuhan klien anak dari hasil sidang TPP kemudian ditentukan program pembimbingan sesuai dengan kebutuhan klien anak. Sebagai contoh untuk klien anak dengan kasus pencurian diberikan bimbingan *konseling dan sharing* secara psikologi , bimbingan agama. Untuk klien anak dengan kasus pencabulan diberikan bimbingan *konseling dan sharing*, bimbingan agama, dan bimbingan psikologi. Untuk klien anak dengan kasus narkoba diberikan bimbingan *konseling dan sharing*, bimbingan psikologi, dan bimbingan *therapeutic community* dengan sistem kelompok yang bekerjasama dengan Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat (RSJKO). Memasuki tahap lanjutan PK Bapas kembali melakukan sidang TPP untuk membahas hasil program bimbingan tahap awal dan membahas program bimbingan kemandirian

yang akan diberikan pada tahap lanjutan. Pada tahap lanjutan klien anak diberikan bimbingan kemandirian sesuai dengan kebutuhan dan minat klien anak yang diadakan oleh Bapas. Bimbingan kemandirian yang diberikan berupa kepramukaan yaitu mengadakan *outbond* untuk melatih kerjasama antar klien anak, latihan menyetir mobil bagi klien anak yang sudah memiliki KTP, latihan *service handphone* dan latihan perbengkelan. Supaya bimbingan kemandirian dapat diikuti oleh semua klien anak maka adanya kerjasama secara rutin dengan instansi swasta dan instansi pemerintah yaitu Dinas Sosial Provinsi Bengkulu dan Balai Latihan Kerja. Pada tahap akhir PK membuat hasil laporan yang menyatakan pembimbingan sudah selesai. Dalam menjalani pembimbingan klien anak diwajibkan untuk melakukakn wajib lapor ke Bapas, supaya bisa menjalani program bimbingan yang diadakan oleh Bapas.

2. Menurut Klien Pemasyarakatan Anak dan Orang Tua Klien

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan klien anak dan orang tua klien bentuk bimbingan yang mereka harapkan dan menurut mereka ideal adalah bimbingan yang memberikan manfaat untuk diri klien anak dan keluarganya, seperti latihan menyetir mobil dilaksanakan sesuai dengan waktu yang tertera di undangan. Pada klien anak yang sudah bisa menyetir mobil diberikan bimbingan pelatihan perbengkelan, sedangkan untuk klien anak yang kurang mampu diberikan modal untuk usaha. Adanya hubungan kerjasama orang tua klien anak dengan Bapas dalam proses pembimbingan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai bentuk bimbingan ideal bagi klien anak kesimpulan penulis bahwa bimbingan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan minat klien anak. Dalam Pembimbingan juga harus melibatkan orang tua klien anak. Sebagai contoh bentuk bimbingan yang ideal untuk klien anak dengan kasus pencurian dan pencabulan diberikan bimbingan *konseling dan sharing* secara psikologi, bimbingan agama, dan bimbingan keterampilan kerja sesuai dengan kebutuhan klien anak. Untuk klien anak dengan kasus narkoba diberikan bimbingan *konseling dan sharing* secara psikologi, bimbingan agama, bimbingan rehabilitasi melalui *therapeutic community* dengan sistem kelompok dan bimbingan keterampilan kerja yang diberikan sesuai dengan kebutuhan klien anak. Supaya Bapas bisa mengadakan keterampilan kerja lebih dari satu kegiatan atau lebih banyak, harus bekerjasama dengan pihak Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, Balai Latihan Kerja atau pihak swasta secara rutin, sehingga bimbingan yang diberikan bisa sesuai dengan kebutuhan klien anak dan merata.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pembimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada klien anak belum sesuai dengan peraturan yang berkaitan dengan pembimbingan, karena bimbingan yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh klien anak. Terhadap klien anak yang tidak melapor ke Bapas, pihak Bapas tidak melakukan pemanggilan melalui surat panggilan dan tidak melakukan *home visit*.
2. Hambatan dalam pelaksanaan pembimbingan terhadap klien anak adalah faktor biaya, sarana dan prasarana, kurangnya kemampuan melakukan konseling pada PK, banyak klien anak yang jarang melapor ke Bapas, klien anak kurang berminat dalam mengikuti program bimbingan yang diadakan Bapas dan kerjasama antara Bapas dengan Pihak ketiga yaitu instansi pemerintah tidak berjalan secara rutin.
3. konsep bimbingan yang ideal adalah harus sesuai dengan aturan yang berkaitan dengan pembimbingan. Bagi klien anak untuk kasus pencurian dan pencabulan diberikan bimbingan *konseling dan sharing* secara psikologi, bimbingan agama, dan bimbingan keterampilan sesuai dengan kebutuhan klien anak. Bagi klien anak untuk kasus narkoba diberikan bimbingan *konseling dan sharing* secara psikologi, bimbingan agama, bimbingan *therapeutic community* serta bimbingan keterampilan kerja.

Saran

1. Semua pembimbing kemasyarakatan harus diberikan pelatihan ilmu atau keahlian konseling, supaya dalam memberikan pembimbingan pada klien anak PK Bapas dapat memberikan bimbingan sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh klien anak.
2. Anggaran untuk melaksanakan bimbingan kemandirian perlu di tingkatkan, supaya ada beberapa jenis latihan keterampilan yang akan diberikan sesuai dengan kebutuhan klien anak.
3. Pihak Bapas hendaknya bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi atau kota supaya dapat memberikan pendidikan bagi klien anak yang putus sekolah.
4. Ada kerjasama secara rutin dengan beberapa pihak ketiga seperti Dinas Sosial Provinsi, Balai Latihan Kerja dan pihak swasta, supaya pembimbingan kemandirian dapat diikuti oleh seluruh klien anak.

DAFTAR PUSTAKA

A.Buku

- Gultom, Maidin, 2012, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung:PT.Refika Aditama.
- Hadikusumo, Hilman, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Atau Skripsi Ilmu Hukum*.Bandung:Mandar Maju.
- Marianti,1985, *Pembinaan Pelanggar Hukum di Luar Lembaga Pemasyarakatan*, Jakarta:AKIP.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta:PT.Grafindo Persada.
- Prakoso, Abintoro, 2013,*Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*,Yogyakarta:PT.Laksbang Grafika.
- Prints, Darwin, 1997, *Hukum Anak Indonesia*. Bandung:PT.Citra Aditya Bhakti.
- Saraswati,Rika, 2009, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*,Bandung:PT.Citra Aditya Bhakti.
- Soegondo, H.R, 1994, *Prinsip-Prinsip Konsepsi Pemasyarakatan Hasil Konferensi Lembang1964 Serta Pengembangannya Dewasa Ini*.Bandung:Makalah disampiakn dalam Ceramah pada SARPENAS II IKA-AKIP Departemen Kehakiman RI Lembang, Bandung 27April 1994.
- Soekanto, Soerjono, 1986 , *Pengantar Penelitian Hukum*.Jakarta:UI Press.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1998, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*.Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Soetodjo, Wagiaty, 2008, *Hukum Pidana Anak*. Bandung:PT.Refika Aditama.
- Soewandi, C.M M arianti, 2003, *Bimbingan dan Penyuluhan Klien*, Jakarta:Departmen Hukum dan HAM RI Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Akademi Ilmu Pemasyarakatan.
- Tim Pengkajian, 2008, *Eksistensi Balai Pemasyarakatan Dalam Sistem Pemasyarakatan*, Jakarta:Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan HAM RI.
- Tim Penyusun, 2009, *Buku Pedoman Pelayanan Penelitian Kemasyarakatan Pembimbingan, Pengawasan, dan Pendampingan*.Jakarta:

Tim Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, 2012, *Modul Pembimbing Kemasyarakatan*, Jakarata: Kementerian Hukum dan HAM RI Direktorat Jendral Pemasyarakatan Direktorat Bimbingan dan Pengentasan Anak.

Waluyo, Bambang, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika

B. Undang-Undang

Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Konvensi tentang Hak-Hak Anak Resolusi No. 109 Tahun 1990.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor M.2.PK.04-10 TAHUN 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat-Syarat Bagi Pembimbing Kemasyrakatan.

Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman RI Nomor : E-39-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan.

Petunjuk Teknis Menteri Kehakiman RI Nomor: E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Pembangunan No. 1 Telepon/Fax: (0736) 23512 Kode Pos: 38225
Website: www.kp2tprovengkulu.go.id Blog: www.kp2tengkulu.blogspot.com

BENGKULU

REKOMENDASI

NOMOR: 503/7.a/ 206 /KP2T/2014

TENTANG PENELITIAN

- Dasar:
1. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 18 Tahun 2013 tanggal 02 Agustus 2013 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non (Bukan) Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
 2. Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Bengkulu Nomor: 185/UN30.4 /PP/2014 , Tanggal 27/01/2014 Penihal Izin Penelitian . Permohonan diterima di KP2T Tanggal 28 January 2014

Lembaga Penyelenggara : -
Nama Peneliti : Febri Putri Rusmita / B1A010004 / Mahasiswa
Maksud : Melakukan Penelitian
Judul Penelitian : Pelaksanaan Pembimbingan Pembimbing Kemasyarakatan Pada Klien Pemasyarakatan Anak Di Balai Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu
Daerah Penelitian : Balai Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu
Waktu Penelitian/Kegiatan : 28 January 2014 s/d 28 March 2014
Penanggung Jawab : Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Bengkulu

Dengan ini merekomendasikan penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan:

- a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Gubernur/Bupati/Walikota Cq. Kepala Badan/Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas atau sebutan lain setempat.
- b. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- e. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Kesbang Pol Provinsi Bengkulu
2. Kepala Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Provinsi Bengkulu
3. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Bengkulu
4. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Bengkulu
5. Yang bersangkutan



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
BADAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

Jl Basuki Rahmat No. 1 Bengkulu Kode Pos 38227

Telp.(0736) 349731 fax. (0736) 26992

Web: bppt.bengkulukota.go.id email: bppt@bengkulukota.go.id

IZIN PENELITIAN

Nomor : 070 / 070 / I / BPPT / 2014

Dasar : Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 31 Tahun 2012 Tanggal 28 Desember 2012 Perubahan Atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Pelimpahan Wewenang Membuat, Mengeluarkan dan Menandatangani Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT).

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu Nomor : 503/7.a/ 206 /KP2T/2014 Tanggal 28 Januari 2014.

DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA :

Nama/NPM : Febri Putri Rusmita / B1A010004
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas : Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Provinsi Bengkulu
Judul Penelitian : Pelaksanaan Pembimbingan Kemasyarakatan Pada Klien Pemasyarakatan Anak Di Balai Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu

Daerah Penelitian : Balai Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu
Waktu Penelitian : 28 Januari 2014 .s.d 28 Maret 2014
Penanggung Jawab : Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Provinsi Bengkulu
Dengan Ketentuan : 1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
2. Harus mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
3. Apabila masa berlaku surat keterangan penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaannya belum selesai, maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan keterangan penelitian.
4. Surat keterangan penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegar ; surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : BENGKULU
Pada Tanggal : 30 Januari 2014
a.n.KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA BENGKULU
KABID PEMERINTAHAN



SYARIKUDIN.C.SH

8871360013 198203 1 006

Tembusan

1. Yth. Kesbang Pol dan Linmas Kota Bengkulu
2. Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Provinsi Bengkulu
3. Yang Bersangkutan



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH BENGKULU
BALAI PEMASYARAKATAN KLAS II BENGKULU
Jalan Kuala Lempuing Bengkulu
Telp/Fax : (0736) 24823
Email : bapاسبengkulu@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : W8.PAS.PAS.5.UM.01.01- **05**

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Balai Pemasyarakatan Klas II Bengkulu menerangkan bahwa :

Nama : FEBRI PUTRI RUSMITA
NPM : B1A010003
Fakultas : Hukum Universitas Bengkulu

Telah / sudah melaksanakan riset penelitian Pada Balai Pemasyarakatan Klas II Bengkulu sesuai dengan judul :

" PELAKSANAAN PEMBIMBINGAN OLEH PEMBIMBING KEMASYARAKATAN PADA KLIEN PEMASYARAKATAN ANAK DI BALAI PEMASYARAKATAN KLAS II BENGKULU "

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bengkulu, 11 Februari 2014
KEPALA,

MISDARTI, Bc.IP.,SH.,M.Si
NIP. 19651212 198811 2 001



CURICULUM VITAE

Nama Lengkap : Febri Putri Rusmita
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir : Curup, 11 Februari 1992
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Tinggi dan Berat Badan : 157 cm / 48 kg
Alamat : Jl. Timur Indah Ujung No.23 Rt.11 Rw.04 Kota Bengkulu
Email : febriputrirusmita@gmail.com
Nama Ayah : Rustam Efendi S.sos
Nama Ibu : Puspa Juita

PENDIDIKAN

- 1. 1996-1998** : TK Pertiwi Curup
- 2. 1998-2004** : SD Negeri 102 Curup
- 3. 2004-2007** : SMP Negeri 4 Kota Bengkulu
- 4. 2007-2010** : SMA Negeri 4 Kota Bengkulu
- 5. 2010-2014** : Fakultas Hukum Universitas Bengkulu